

PENGARUH PEMBERDAYAAN OLEH DINAS PERTANIAN TERHADAP EFEKTIVITAS HASIL PERTANIAN DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR

Wijaya Kusuma^{1*}

* Korespondensi:

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 10-04-2024)
(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 30-12-2024)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pemberdayaan Oleh Dinas Pertanian Terhadap Efektivitas Hasil Pertanian Di Desa Gunungsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Masalah dalam penelitian ini adalah tidak efektifnya hasil pertanian di Desa Gunungsari, Hal ini terlihat dari Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur kurang mengembangkan pemberdayaan masyarakat khususnya petani sehingga hasil pertanian tidak efektif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 8.652 orang dengan jumlah sampel sebanyak 128 orang. Hasil penelitian, Pemberdayaan oleh Dinas Pertanian di Desa Gunungsari dengan dimensi prinsip-prinsip Participatory Rural Apraisal didapat nilai rata-rata sebesar 1.81 (berada pada interval 1.67 – 2.33), nilai tersebut berada dalam kategori cukup baik. Efektivitas hasil pertanian dengan dimensi pengukuran efektivitas, didapat nilai rata-rata sebesar 1.77 (berada pada interval 1.67 – 2.33), nilai tersebut berada dalam kategori cukup baik. Pengaruh pemberdayaan oleh Dinas Pertanian terhadap efektivitas hasil pertanian di Desa Gunungsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, Koefisien diterminannya adalah $0.71^2 \times 100\% = 50.41\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa Pengaruh pemberdayaan oleh Dinas Pertanian terhadap efektivitas hasil pertanian di Desa Gunungsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur adalah sebesar 50.41%, sedangkan sisanya 49.59% adalah faktor lain.

Kata kunci: Pemberdayaan, Desa, dan Petani

Wijaya Kusuma. 2024. Pengaruh Pemberdayaan Oleh Dinas Pertanian Terhadap Efektivitas Hasil Pertanian Di Desa Gunungsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Segenap upaya pembangunan dituangkan dalam berbagai kebijakan yang ditujukan bagi masyarakat yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus sebagai sumber daya pembangunan yang harus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan kekhasan suatu daerah. Setiap daerah di dalam mengatur urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat perlu adanya partisipasi masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pertanian di Indonesia salah satu sektor yang harus di beri perhatian khusus oleh pemerintah karena sektor ini begitu krusial dimana melihat potensi sumber daya alam yang melimpah selain itu juga sektor ini bisa menjadi ladang eksportir bagi negara yang pastinya nanti dapat menopang perekonomian Indonesia apabila bisa di kelola dengan baik. Sudah banyak produk pertanian Indonesia yang sudah di ekspor misalnya saja produk pertanian berupa hasil perkebunan (hortikultura) dan juga kelapa sawit.

Seiring berjalanya waktu dan Zaman pertanian di Indonesia mengalami beberapa problematika yang

menjadi perhatian bagi masyarakat petani dan para akademisi, misalnya saja alih fungsi lahan, yang memaksa pergeseran area pertanian menjadi pemukiman penduduk. Dimana alih fungsi lahan ini sudah banyak terjadi, akibatnya banyak migrasi yang dilakukan masyarakat dari desa ke kota. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terkenal sebagai salah satu penghasil padi atau lumbung padi. Salah satu desa yang terkenal dengan hasil pertaniannya adalah Desa Gunungsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Adapun jumlah penduduk Gunungsari adalah 8.612 jiwa, dengan mata pencaharian sebageian besar adalah petani.

Beberapa permasalahan yang muncul di Desa Gunungsari adalah banyak petani di Desa Gunugsari yang masih menggunakan alat pertanian tradisional dan belum beralih kepada pertanian modern, dan hasil pertanian yang seharusnya bisa mencapai 11-12 ton/hektar, di desa Gunungsari maksimal hanya bisa mencapai 8 ton/hektar.

B. KAJIAN PUSTAKA Pemberdayaan

Salah satu cara pengentasan kemiskinan adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan berkaitan dengan proses kemandirian suatu kelompok, berkaitan dengan Menurut Rappaport seperti dikutip Hikmat (2004:3) pemberdayaan dapat diartikan sebagai: "Pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang".

Suhendra (2006:74) mengemukakan pengertian pemberdayaan adalah "Suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan

semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi". Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang terasa asing dalam komunitasnya.

Menurut Suhendra (2006:75) mengartikan pemberdayaan masyarakat adalah: "sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat". Ada beberapa teknik pemberdayaan, Suhendra (2006:104) mengemukakan teknik-teknik pemberdayaan, yaitu:

1. Participatory Rural Appraisal.
2. Metode Partisipatory Assesment dan Perencanaan.
3. Metode Lokakarya.
4. Teknik Brainstorming.
5. CO-CD (Comunity Organizasion and Comunity Development).

Prinsip-prinsip Participatory Rural Appraisal dalam implementasinya menurut Suhendra (2006:108-110) mencakup lima program dasar, yaitu:

1. Penjajakan / pengenalan kebutuhan;
2. Perencanaan kegiatan;
3. Pelaksanaan dan pengorganisasian kegiatan;
4. Pemanduan kegiatan; dan
5. Evaluasi kegiatan.

Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa "Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, dijelaskan bahwa Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Efektivitas

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu target atau tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian menurut miller (dalam Tangkilisan 2005:138) yang menyatakan bahwa "Efektifitas dimaksudkan sebagai salah satu tingkatan seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuan. Efektifitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.

Menurut pendapat Emitai Etzioni (dalam Indrawijaya, 1989: 227) menjelaskan pengukuran efektivitas organisasi yang disebut model sistem yaitu :

- 1) Adaptasi, yaitu kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
- 2) Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan macam organisasi lainnya.
- 3) Motivasi, yaitu keterlibatan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan

sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

4) Produksi, yaitu ukuran organisasi dihubungkan dengan jumlah mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

C. METODOLOGI PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun instrument penelitian yang digunakan adalah: angket, observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Adapun Populasi dalam penelitian berjumlah 8.652 orang dengan jumlah sampel 128 orang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan oleh Dinas Pertanian di Desa Gunungsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dengan dimensi prinsip-prinsip Participatory Rural Apraisal yaitu: Penjajakan / pengenalan kebutuhan; Perencanaan kegiatan; Pelaksanaan dan pengorganisasian kegiatan; Pemanduan kegiatan; dan Evaluasi kegiatan. Berdasarkan penyebaran angket dan perhitungan didapat nilai rata-rata sebesar 1.81 (berada pada interval 1.67 - 2.33), nilai tersebut berada dalam kategori cukup baik. Artinya hasil yang diperoleh variabel bebas yaitu pemberdayaan hasil analisisnya adalah cukup baik.

Efektivitas hasil pertanian di Desa Gunungsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dengan dimensi pengukuran efektivitas, yaitu : Adaptasi, Integrasi, Motivasi dan Produksi, berdasarkan penyebaran angket dan perhitungan didapat nilai rata-rata sebesar 1.77 (berada pada interval 1.67 - 2.33), nilai tersebut berada dalam kategori cukup baik. Artinya hasil yang diperoleh variabel terikat yaitu

efektivitas hasil analisisnya adalah cukup baik.

Pengaruh pemberdayaan oleh Dinas Pertanian terhadap efektivitas hasil pertanian di Desa Gunungsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi, yaitu $KD = r^2 \times 100\%$. Koefisien diterminannya adalah $0.71^2 \times 100\% = 50.41\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa Pengaruh pemberdayaan oleh Dinas Pertanian terhadap efektivitas hasil pertanian di Desa Gunungsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur adalah sebesar 50.41%, sedangkan sisanya 49.59% adalah faktor lain yang tidak diteliti serta ikut mempengaruhi efektivitas hasil pertanian di Desa Gunungsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur seperti kesuburan lahan pertanian, kondisi sosial budaya dimana banyak generasi muda yang memilih bekerja di Kota dan lainnya.

Dengan demikian, hipotesis yang peneliti ajukan yaitu : "Jika pemberdayaan oleh Dinas Pertanian berdasarkan prinsip-prinsip Participatory Rural Apraisal maka berpengaruh terhadap efektivitas hasil pertanian di Desa Desa Gunungsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur", telah teruji secara empirik melalui penelitian di lapangan.

E. KESIMPULAN

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur sudah berdasarkan prinsip-prinsip Participatory Rural Apraisal, yaitu: Penjajakan/ pengenalan kebutuhan, Perencanaan kegiatan, Pelaksanaan dan pengorganisasian kegiatan, Pemanduan kegiatan, dan Evaluasi kegiatan. Begitu pula dengan efektivitas hasil pertanian

di Desa Gunungsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, yang meliputi: Adaptasi, Integrasi, motivasi dan produksi sudah terpenuhi.

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah lebih ditingkatkannya komunikasi dan koordinasi antara aparat Dinas Dinas Pertanian khususnya Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian dengan stakeholders terkait terutama dari pemangku kepentingan di Desa seperti Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Direktur Bumdes dan lainnya, untuk membuka peluang pemasaran pertanian kepada dunia usaha sehingga hasil pertanian di Desa Gunungsari mempunyai daya tawar yang tinggi. Dinas Pertanian diharapkan menggunakan semua media sosial yang ada guna mensosialisasikan masalah-masalah pertanian yang muncul sehingga menarik perhatian semua pihak yang berkepentingan sehingga memancing mereka untuk terjun langsung ke petani untuk mentasi masalah-masalah tersebut. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan terutama petugas PPL Pertanian dan juga bagi kelompok tani, termasuk penguatan kapasitas individu petani sehingga dalam menanggulangi masalah-masalah pertanian dapat di respon lebih cepat oleh Dinas Pertanian maupun kelompok tani di Desa Gunungsari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 1989. *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung : Refika Aditama.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan*

Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES.

- Lubis, Ibrahim. 1985. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riduwan dan Akdon. 2006. *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sondang P. 2004. *Analisa dan Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*. Jakarta: Tarsito.
- Sudjana. 1989. *Metode Statistika*. Bandung : Tarsito.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Andi Tama.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Syarif, Moh. 2015. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

Dokumen

- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar RI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang*

*Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.*

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.*